

## **BAB VII**

# **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka mencapai visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, melalui strategi yang telah di sebutkan dalam Bab VI maka disusunlah kebijakan umum dan program yang merupakan pedoman bagi SKPD dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing. Strategi dan kebijakan umum pembangunan yang direncanakan selaras dengan Sembilan Prioritas Pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2014-2019, dengan visi dan penjabaran ke dalam lima misi yang ingin di raih dalam lima tahun ke depan.

Sembilan Prioritas Pembangunan yang menjadi indikator pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tersebut yaitu : (1) Pendidikan, agama dan budaya; (2) Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat; (3) Perbaikan struktur ekonomi rakyat; (4) Pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian dalam arti luas; (5) Perbaikan infrastruktur perhubungan; (6) Pembukaan peluang kerja; (7) Pemenuhan kebutuhan kelistrikan sampai ke pedesaan, (8) Penguatan kapasitas lembaga pemerintahan depan dengan ADD/ADK sebesar Rp 250 juta/tahun dan kecamatan Rp. 1 milyar/ tahun, serta perbaikan pendapatan bagi Pegawai Negeri Sipil; dan (9) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

**7.1. MISI 1 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Memantapkan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan dan jembatan serta pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang efektif	Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan	%	65	80	Program pembangunan jalan dan jembatan	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase tingkat pemeliharaan jalan dan jembatan	%	65	100	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan		
			Melaksanakan pembangunan workshop dan pemeliharaan alat berat dan pengadaan alat berat	Persentase tingkat sarana dan prasarana kebinamargaan	%	65	100	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
			Fasilitasi pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan	Persentase tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan	%	28	100	Program Pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan		
			Meningkatkan pelaksanaan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase pelaksanaan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	%	0	100	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan		
			Meningkatkan pelaksanaan tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase kegiatan tanggap darurat jalan dan jembatan	%	0	95	Program tanggap darurat jalan dan jembatan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase tingkat pembangunan infrastruktur perdesaan	%	65	100	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatkan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Persentase tingkat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	40	100	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			
	Meningkatkan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong		Persentase pelaksanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	%	65	100	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong			
	Meningkatkan pembangunan turap / talud / bronjong		Persentase pelaksanaan pembangunan turap / talud / bronjong	%	0	70	Program pembangunan turap / talud / bronjong			
	Meningkatkan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong		Persentase kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong	%	0	60	Program rehabilitasi pemeliharaan talud / bronjong			
	Memantapkan kualitas sistem jaringan irigasi dan sungai serta pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Mengembangkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tingkat pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	%	65	75	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya			
	Meningkatkan sistem pengolahan sumber air baku dan pengendalian banjir	Peningkatan penyediaan dan pengolahan sumber air baku	Persentase jumlah penyediaan dan pengolahan sumber air baku	%	0	65	Program penyediaan dan pengolahan sumber air baku			
		Melakukan kegiatan pengendalian banjir	Persentase tingkat kegiatan pengendalian banjir	%	0	75	Program pengendalian banjir			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Mewujudkan pengembangan perumahan dan permukiman	Terwujudnya kualitas lingkungan sehat perumahan yang layak, aman dan nyaman yang didukung dengan prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU)	Terwujudnya pengembangan perumahan dan permukiman	Peningkatan kapasitas lingkungan sehat perumahan, pengembangan dan pemberdayaan komunitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat	%	0	100	Program lingkungan sehat perumahan	Urusan Wajib Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase ketersediaan perumahan bagi masyarakat yang terjangkau	%	0	70	Program pengembangan perumahan		
				Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas perumahan	%	0	100	Program pemberdayaan komunitas perumahan		
Mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang serasi dan sesuai peruntukannya	Memaksimalkan pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku	Penerapan sistem pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang secara terpadu dan konsisten	Persentase tingkat kapasitas perencanaan tata ruang	%	55	95	Program Perencanaan tata ruang	Urusan Wajib Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
				Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	kegiatan	2	10	Program Pemanfaatan Ruang		
				Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	orang	18	28	Program pengendalian pemanfaatan ruang		
Terwujudnya peningkatan pelayanan kebutuhan informasi dan komunikasi bagi aparatur dan publik	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Menyediakan sistem informasi publik yang dapat diakses oleh aparatur dan publik	Membangun dan meningkatkan sistem informasi daerah yang memuat data informasi pembangunan serta aplikatif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Ketersediaan jaringan internet dan intranet kecamatan dan SKPD terkait	kec. SKPD	0 15	12 23	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi	Bapersikom

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Terlaksananya distribusi informasi melalui media massa, media baru, media tradisional, media internasional dan media luar runang	kali	0	48	Program kerjasama informasi dan media massa		
	Meningkatnya kualitas SDM pengelola jaringan internet	Fasilitasi pelaksanaan diklat teknis pengelolaan jaringan	Meningkatkan kapasitas diklat teknis bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang mengikuti diklat	orang	0	20	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
Meningkatkan pengelolaan ketenagalistrikan	Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Meningkatnya kapasitas penyediaan listrik bersama PLN dan pihak swasta	Peningkatan cakupan elektrifikasi sesuai kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kapasitas daya terpasang PLN	MW	20	40	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Meningkatnya daya mampu PLN	MW	12	25			
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan air bersih / PDAM	Meningkatnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat	Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas air bersih	Pembangunan sumber air baku baru, perbaikan sistem jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah (SR)	Terbangunnya sumber air baku	unit	1	2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM
				Persentase kehilangan air	%	> 45	< 20			
				Jumlah sambungan rumah	SR	6.220	11.624			
			Reformasi manajemen PDAM	Meningkatnya status akreditasi PDAM	Sehat/tidak sehat	Tidak Sehat	Sehat			

**7.2. MISI 2 : MENINGKATKAN KINERJA EKONOMI MELALUI EKONOMI KERAKYATAN**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatnya produksi dan kualitas pertanian dalam arti luas	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Tersedianya benih tanaman pangan	ton	4	204	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan
				Tersedianya bibit hortikultura	pohon	5.967	25.967			
				Tercetaknya lahan sawah	ha	0	1.000			
		Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan	Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan	Terlaksananya gerakan pengendalian hama dan penyakit	paket	1	5			
				Terlaksananya pengawasan terhadap pestisida dan pupuk palsu	paket	1	5			
		Melaksanakan penangkaran dan sertifikasi benih/bibit tanaman	Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan optimalisasi BPSB	Terlaksananya penangkaran benih :	ha ha	5	250			
				- Padi sawah - Kedelai		0	50			
		Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian, hortikultura dan peternakan	Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian, hortikultura dan peternakan	Terlaksananya pembangunan air irigasi tanah dalam/dangkal	unit	12	35			
				Terbangunnya drainase	paket	-	7			
				Terlaksananya pembangunan DAM	unit	11	38			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Terlaksananya rehabilitasi JUT	km	98,90	173,90		Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan
				Terlaksananya rehabilitasi JIDES / JITUT	ha	6.366,4	10.595			
				Terbangunnya TAM	unit	10	24			
				Terlaksananya pembangunan embung	unit	18	56			
				Terlaksananya irigasi air permukaan	unit	35	110			
	Meningkatkan sarana alsintan	Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani	Tersedianya alsintan :	unit	495	724				
			- Hand traktor	unit	0	21				
			- Cultivator	unit	389	526				
			- Power threaser	unit	17	59				
			- Pompa air	unit						
	Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan	Tersedianya bibit ternak	ekor	672	2.672	Program peningkatan hasil produksi peternakan			
		Pencegahan / pemberantasan penyakit hewan	Terlaksananya pencegahan penyakit ternak (vaksinasi)	dosis	2.500	12.500	Program pencegahan penanggulangan penyakit hewan			
			Terlaksananya inseminasi buatan	dosis	300	1.500	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM petugas, petani dan peternak	Menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian, hortikultura dan peternakan	Pemberdayaan kelompok wanita tani	kelompok	1	5	Program peningkatan kesejahteraan petani	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan
				Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Produktif Pertanian (MEEP)	kelompok	1	5			
	Peningkatan produksi, produktivitas & mutu tanaman perkebunan	Meningkatkan mutu/kualitas dan kuantitas produksi tanaman perkebunan	Memberikan bantuan bibit dan melaksanakan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan	Jumlah total produksi perkebunan	ton	34.429,09	50.899,38	Program peningkatan produksi perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Perkebunan
Jumlah bibit tanaman perkebunan yang disediakan				pohon	165.000	1.596.542				
Jumlah pupuk dan pestisida yang disediakan				ton	0	1.400				
Luas lahan yang di intensifikasi, rehabilitasi dan diremajakan				ha	100	6.170				
Meningkatnya penurunan luas serangan opt komoditi utama perkebunan yang terkendali				ha	3.000	4.392	Program penanggulangan OPT perkebunan			
Melaksanakan pelatihan bagi petani serta memberikan bantuan peralatan pasca panen				orang	245	3.675	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan			
Jumlah sarana pengolahan hasil yang tersedia				unit	30	559				



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Meningkatnya luasan areal perkebunan	Memberikan bantuan biaya pengolahan lahan baik dalam rangka perluasan maupun pemanfaatan lahan tidur	Terlaksananya perluasan areal : - Kakao - Kelapa Dalam - Cengkeh - Lada - Pala - Nilam	ha ha ha ha ha ha	29.166,76 3.529,01 3.807,3 1.540,53 9,5 1.097,5	31.410,10 4.529,00 8.807,30 1.906,50 1.004,50 1.749,30	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Perkebunan
		Meningkatkan infrastruktur perkebunan	Pembangunan jalan produksi	Panjang jalan yang dibangun	km	3	46			
			Pembuatan embung	Jumlah embung yang dibuat	buah	0	5	Program pengelolaan lahan dan air		
			Pembangunan transportasi air secara vertikal	Jumlah pompa hidran yang dibangun	unit	0	10			
Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	Meningkatnya efisiensi usaha pertanian	Melaksanakan efisiensi usaha pertanian	Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran	Promosi produksi pertanian dalam kegiatan agro dan food expo  Terlaksananya temu teknologi dan promosi hasil-hasil pertanian	kegiatan  kegiatan	1  1	5  1	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian  Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan
	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong terwujudnya kemitraan usaha perkebunan	Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif	Mengikuti kegiatan pameran/expo	Jumlah investor bidang perkebunan	perusahaan	1	6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Perkebunan
Meningkatkan produksi dan produktifitas kelautan dan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan	Menyediakan sarana dan prasarana penangkapan ikan	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	19.880	21.521	Program pengembangan perikanan tangkap  Program pengembangan kelembagaan penangkapan ikan	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya	Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	45.953	60.219	Program pengembangan budidaya perikanan	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Menciptakan kemandirian pelaku usaha perikanan dan kelautan	Memberikan pelatihan keterampilan dan menciptakan peluang usaha	Jumlah kelompok perikanan yang terbina	kelompok	30	100	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan		
				Jumlah produk olahan perikanan yang dipasarkan	ton	2.650	3.800	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		
Meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan	Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatkan pemberdayaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatkan kesadaran pengelolaan lingkungan perikanan	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang terbina	kelompok	30	85	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		
		Memelihara sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	Terpeliharanya eksistensi sumber daya perikanan	Luas kawasan konservasi sumberdaya periran yang terpelihara	ha	60.400	60.400	Program konservasi dan rehabilitasi sumber daya perairan		
		Menjaga sumber daya hayati dan lingkungan serta kelestarian biota laut lainnya	Peningkatan kesadaran hukum dalam pengelolaan potensi kelautan dan perikanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	kali	6	48	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya laut		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR							
						2013	2018							
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutu, aman, merata, terjangkau, berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi	Ketersediaan energi dan protein per kapita kabupaten	k.kal	2.843	3.600	Program peningkatan ketahanan pangan	Urusan Wajib Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan				
			Penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat	Penguatan cadangan pangan masyarakat / pemerintah	ton	28.684	31.356							
				Penguatan kelembagaan ekonomi kelompok lumbung pangan	kelompok	23	40							
				Pembangunan lumbung pangan, lantai jemur, dan RMU	unit	4	29							
	Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat	Mengoptimalkan distribusi dan akses pangan  Pendukung terhadap akses dan sumber data yang valid	Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan  Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	K (Nilai Capaian Ket. Informasi)	94.42				99			
				Stabilitas harga dan pasokan pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	SKi	89				99			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
						2013	2018					
	Meningkatnya percepatan diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan dan mencegah kerawanan pangan	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat berbasis pangan lokal	Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	62,5	87		Urusan Wajib Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan		
				Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial	Pengembangan teknologi pengolahan pangan	unit				0	50
				Meningkatkan pengawasan dan penanganan keamanan pangan	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%				75	85
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%			66,67	80					
		Penyusunan Food Security And Vulnerability Atlas (VSFA)	kegiatan			1	11					
		Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan	Penguatan lembaga Dewan Ketahanan Pangan Daerah			kegiatan	1				5	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Meningkatkan kapasitas perempuan dalam pemenuhan gizi masyarakat	Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga dan keluarga	Peningkatan kapasitas perempuan	kegiatan	1	16		Urusan Wajib Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
Meningkatkan kemampuan SDM dan sistem penyuluhan	Meningkatnya kemampuan SDM pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pelaku utama dan pelaku usaha melalui pembinaan dan diklat	Melaksanakan kursus, pelatihan kemampuan manajemen kelembagaan petani-nelayan dan diklat teknis non pns	Meningkatnya PKS pelaku utama dan pelaku usaha dengan baik	orang	25	2.500	Program pengembangan sistem penyuluhan	Urusan Pilihan Pertanian	BP4K
			Penilaian penyuluh berprestasi/teladan tingkat kabupaten	Penyuluh, gapoktan dan petani-nelayan berprestasi/teladan tingkat kabupaten	paket	1	5			
			Penilaian angka kredit penyuluh	Nilai hasil DUPAK penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	orang	99	135			
		Meningkatkan peranan poktan dan gapoktan	Pengembangan kelembagaan poktan dan gapoktan	Jumlah poktan dan gapoktan	kelompok	0	960	Program peningkatan kesejahteraan petani		
			Pekan nasional Kontak Tani Andalan Nasional (KTNA)	Jumlah peserta KTNA	orang	0	70			
		Meningkatkan demfarm / kaji terap	Pelaksanaan demfarm dan kaji terap	Jumlah demfarm padi non organik	unit	2	50	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian		
				Jumlah demfarm padi organik	unit	1	49			
				Kaji terap peternakan kambing PE	unit	0	14			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Kaji terap teknologi pertanian di lahan BPP	unit	1	49		Urusan Pilihan Pertanian	BP4K
			Kaji terap teknologin pertanian perkebunan kelapa	unit	1	17				
			Kaji terap teknologi perikanan	unit	3	12				
		Meningkatkan kemampuan penyuluh dalam penyusunan program	Penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten	Tersusunnya program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten	dokumen	1	5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan		
			Penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan	Tersusunnya program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan	dokumen	12	60			
			Biaya operasional penyuluh pertanian	Terwujudnya kinerja aparat penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	orang	99	135			
Terwujudnya kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UMKM	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui peranan koperasi dan UMKM	Meningkatkan kualitas kelembagaan, permodalan dan manajemen koperasi dan UMKM	Fasilitasi permodalan dan manajemen koperasi dan UMKM oleh pemda, lembaga keuangan dan dunia usaha	Jumlah koperasi dan UMKM yang bertumbuh	unit	6.168	6.785	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Urusan Wajib Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag
				Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan	unit	125	245	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah		
				Jumlah UMKM yang mengembangkan usaha produktif	unit	5.764	5.884			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan dan manajemen dari pemda, lembaga keuangan dan dunia usaha	unit	0	404	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Urusan Wajib Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag
			Jumlah koperasi yang menerapkan teknologi sederhana / manajemen modern	unit	0	5	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			
			Jumlah kelembagaan koperasi	404	450					
			Jumlah koperasi yang mandiri dan produktif	0	320					
Terbukanya peluang pasar ekspor maupun pasar dalam negeri dan menjamin ketersediaan barang dan perlindungan konsumen	Terbangunnya pasar ekspor dan pasar dalam negeri	Meningkatkan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor, menjamin ketersediaan komoditas dalam negeri dengan memberdayakan potensi daerah	Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan daerah	Terlaksananya tertib ukur alat UTPP dan perlindungan konsumen	kali	10.257	30.408	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Koperindag
				Jumlah UPTD metrologi	unit	0	1			
				Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	unit	223	343	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		
			Menjamin stabilitas harga dan distribusi melalui pelibatan perbankan, BUMN, BUMD dan lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya kerjasama perdagangan internasional	kali	0	5	Program peningkatan kerjasama internasional		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Terlaksananya perdagangan ekspor	kali	40	70	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Koperindag
				Jumlah perdagangan antar pulau	kali	100	160			
				Sisialisasi dan pembinaan perdagangan	kali	13	54	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		
				Jumlah gudang yang menerapkan SRB	uni	30	38	Program peningkatan sarana dan prasarana pergudangan		
				Jumlah pasar tradisional / modern ke kecamatan	unit	26	40			
Terwujudnya ekonomi masyarakat yang handal dengan bertumbuh-kembangnya industri kecil menengah dan industri kerajinan yang produktif berdasarkan kearifan lokal	Meningkatnya ekonomi masyarakat yang mandiri melalui pengembangan industri kecil menengah yang tangguh dan berdaya saing	Menumbuh-kembangkan industri-industri yang potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan	Memfasilitasi percepatan pembangunan industri daerah berbasis keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah	Persentase barang yang terstandarisasi	%	10	25	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Urusan Pilihan Perindustrian	Dinas Koperindag
		Mengembangkan industri dengan menggunakan teknologi tepat guna dan investasi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia dan SDM yang profesional	Memfasilitasi kemudahan pengembangan sarana dan prasarana industri kecil menengah	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pemanfaatan sumberdaya	unit	12	26	Program pengembangan industri kecil dan menengah		



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Tersusunnya kebijakan industri penunjang IKM	dokumen	0	5		Urusan Pilihan Perindustrian	Dinas Koperindag
				Jumlah IKM yang mendapat fasilitas perbankan	unit	0	25			
				Jumlah IKM yang bermitra	unit	0	5			
				Terlaksananya pameran hasil produksi IKM	kali	5	25			
				Terbangunnya sarana dan prasarana IKM	%	2	6	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		
				Terlaksananya program pengembangan industri kerajinan nasional daerah	%	5	25	Program pengembangan industri kerajinan nasional daerah		
Menyediakan dan memfasilitasi tenaga kerja yang kompeten produktif dan berdaya saing dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja	Pelatihan / pemagangan tenaga kerja yang berdaya saing	Menciptakan tenaga kerja yang terampil yang berdaya saing	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	20	200	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Urusan Wajib Ketenaga-kerjaan	Dinas Nakertrans
				Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat dan kewirausahaan	orang	180	720			
	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Memantau penempatan tenaga kerja yang siap pakai pada lembaga pemerintahan dan perusahaan / dunia usaha	Memantau penempatan tenaga yang siap pakai	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	orang	1.000	5.000	Program peningkatan kesempatan kerja		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan keikutsertaan pada / BPJS ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketena-gakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	perusahaan	100	500	Program perlindungan dan pengembangan lembaga hubungan industrial ketenagakerjaan	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans
		Pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan diperusahaan	Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	perusahaan	100	500	program perlindungan dan pengembangan lembaga pengawasan ketenagakerjaan		
Mengembangkan kawasan dan membina warga transmigrasi menjadi tempat tinggal dan memiliki usaha ekonomi produktif	Kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha yang layak	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi	Jumlah pemukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigrasi yang ditempatkan di kawasan transmigrasi	KK	100	250	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Urusan Pilihan Transmigrasi	Dinas Nakertrans
		Terwujudnya kapasitas sumberdaya masyarakat transmigrasi	Terwujudnya permukiman dalam kawasan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi	Meningkatkan kegiatan sumberdaya masyarakat transmigrasi	Jumlah transmigran lokal yang mandiri	orang	35	175		
	Jumlah transmigran regional yang mandiri			orang	35	175	Program transmigrasi regional			

### 7.3. MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA Penguatan SENDI-SENDI BUDAYA DAN AGAMA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan	Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan disemua jenjang pendidikan	Perluasan akses dan pemerataan layanan sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh masyarakat	Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan jenjang pendidikan lainnya	Angka partisipasi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	26,45	32,45	Program pendidikan anak usia dini	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Dikmudora
				Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar 9 tahun	%	79,12	85,12	Program wajib belajar belajar sembilan tahun		
				Standar Pelayanan Minimal satuan pendidikan dasar 9 tahun	%	81,35	86,35			
				Angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah	%	62,18	68,18	Program pendidikan menengah		
				Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK terhadap jumlah usia sekolah (16-18 tahun)		23:10.000	24:10.000			
				Rasio ketersediaan guru SMA/SMK terhadap siswa		915:10.000	915:10.000			
				Rasio guru terhadap siswa per kelas rata-rata (SMA/SMK)		67:10.000	67:10.000			
				Jumlah Layanan pendidikan khusus/inklusi SDLB, SMPLB dan SMALB dan Sekolah Luar Biasa (SLB)	unit	11	13	Program pendidikan luar biasa		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan dengan dunia kerja serta daya saing pendidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan relevansi layanan pendidikan dengan dunia kerja serta daya saing pendidikan	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan di semua jenjang pendidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1/DIV	%	82,50	87,50	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Dikmudora
	Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan	Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif	Terlaksananya program tata kelola dan manajemen pelayanan pendidikan	%	90	96	Program peningkatan tata kelola pendidikan		
								Program peningkatan layanan dan akuntabilitas pendidikan		
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, status gizi masyarakat dan pengendalian penyakit serta penanggulangan masalah kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)	Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	60,3	90	Program peningkatan pelayanan anak balita	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Menurunnya angka kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	0,5	1			
				Cakupan deteksi dini tumbuh kembang balita	%	48,1	90			
				Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	67,7	95	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	59,8	80		Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	80	90			
				Cakupan pelayanan nifas	%	73,5	95			
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	25	90			
				Cakupan kunjungan neonatal lengkap (K3)	%	83,7	90			
				Cakupan kunjungan bayi	%	82,1	95			
				Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	52,3	100			
				Meurunnya angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 KH	267	120			
				Menurunnya angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,7	8			
				Cakupan kunjungan ibu hamil (K1)	%	73,1	95			
				Cakupan peserta KB aktif (CPR)	%	66,14	75			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Cakupan kunjungan neonatal (KN1)	%	85,8	95		Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjarangan siswa kelas I	%	50,5	100			
		Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Perluasan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang memiliki posyandu usia lanjut	puskesmas	2	12	Program peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut		
				Meningkatnya usia harapan hidup	tahun	67,68	72	Program upaya kesehatan masyarakat		
				Cakupan jaminan kesehatan	%	89	100			
				Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita	%	27,6	100			
				AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	per 100.000 penduduk	2	≥ 2			
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	%	100	100	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
						2013	2018				
			Memfasilitasi kecukupan pemenuhan gizi masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yg mendapat perawatan	%	100	100%	Program perbaikan gizi masyarakat	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Cakupan pemberian MP-ASI anak 6-24 bulan dari keluarga miskin	%	100	100%				
				Menurunnya prevalensi :							
				- Gizi kurang pada balita	%	0,6	< 15				
				- Gizi buruk pada balita	%	0,05	< 2				
				Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif	%	39,8	79,8				
				Cakupan balita (6-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A dua kali/tahun	%	80,34	85				
				Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	%	77,99	84,8				
			Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	65,67	85					
			Persentase desa dengan garam beryodium baik	%	97,2	90					
	Menurunnya prevalensi angka kesakitan, angka kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan upaya dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan cakupan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan penderita baru TB BTA positif (Case Detection Rate=CDR)	%	376	> 70	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Angka Notifikasi kasus ( <i>Case Notification Rate=NCR</i> ) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	111	224		Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Angka konversi ( <i>Conversion Rate</i> )	%	92	> 85			
				Angka kesembuhan kasus baru TB BTA positif ( <i>Cure Rate</i> )	%	93,4	> 80			
				Angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB BTA positif ( <i>Success Rate</i> )	%	94,64	> 95			
				<i>Annual Parasite Incidence(API)</i> per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,17	< 1			
				Persentase penderita malaria diobati	%	100	100			
				Kasus infeksi menular seksual (IMS) yang diobati	%	100	100			
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	%	100	100			
				Cakupan penderita DBD yg ditangani sesuai standar	%	100	100			
				Penemuan penderita DBD / 100.000 penduduk		59	1			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Persentase angka bebas jentik (ABJ)	%	0	≥90		Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase kasus rabies yang ditangani sesuai standar	%	100	100			
				Persentase desa / kelurahan mengalami KLB yang ditangani dengan PE < 24 jam	%	100	100			
				Persentase desa / kelurahan UCI	%	85,06	100			
				Persentase anak SD yang mendapat imunisasi (BIAS)	%	96	100			
				Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 tahun	%	< 0,5	< 0,5			
				Persentase penduduk usia 15 - 14 tahun yang memilki konprehensif tentang HIV/AIDS	%	20	95			
				Persentase kecamatan yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman	%	0	100			
				Persentase rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA	%	0	100			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Persentase ODHA yang mendapatkan ART	%	50	90		Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan	Melengkapi pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	%	67	100	Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / pustu dan jaringannya	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase puskesmas dengan gedung dan peralatan sesuai standar	%	67	100				
			Persentase pustu dengan gedung dan peralatan sesuai standar	%	74	90				
			Persentase poskesdes dengan gedung dan peralatan sesuai standar	%	48	90				
			Persentase puskesmas dengan fasilitas perawatan	%	17	100				
			Cakupan pustu terhadap desa	%	59	59				
			Persentase puskesmas dengan fasilitas PONEB	%	25	42				
			Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	per 30.000 penduduk	1,5	1,6				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Rasio poskesdes terhadap jumlah penduduk	per 10.000 penduduk	2,5	4,3		Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan puskesmas terhadap kecamatan	%	100	117			
				Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk	per 150.000 penduduk	1,8	1,8			
	Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan terdistribusi secara merata sesuai kebutuhan	Peningkatan kualitas, kuantitas dan penataan distribusi tenaga kesehatan	Meningkatkan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk	per 100.000 penduduk	8	40	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		
Rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk				per 100.000 penduduk	4	9				
Rasio dokter gigi terhadap jumlah penduduk				per 100.000 penduduk	4	10				
Rasio apoteker terhadap jumlah penduduk				per 100.000 penduduk	6	10				
Rasio bidan terhadap jumlah penduduk				per 100.000 penduduk	41	100				
Rasio perawat terhadap jumlah penduduk				per 100.000 penduduk	61	118				
Rasio ahli gizi terhadap jumlah penduduk				per 100.000 penduduk	11	22				
Rasio tenaga sanitasi terhadap jumlah penduduk				per 100.000 penduduk	11	40				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap jumlah penduduk	per 100.000 penduduk	45	40		Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas dengan keteknisan medis	%	0	40			
				Persentase desa dengan bidan desa	%	62	100			
	Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan serta terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu peredaran obat dan perbekalan kesehatan	Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan peredaran obat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, terselenggaranya pengawasan dan mutu peredaran obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, kosmetik, makanan dan minuman	Jumlah anggaran obat per kapita pertahun untuk pelayanan kesehatan masyarakat	Rp / US \$	Rp. 5.529	≥ US \$ 1	Program obat dan perbekalan kesehatan		
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan				%	80	100				
Rasionalisasi penggunaan obat di sarana kesehatan				%	91	97	Program pengawasan obat dan makanan			
Persentase pengembangan obat tradisional di puskesmas terpilih				%	60	70				
Persentase produk kemasan makanan dan minuman yang memenuhi syarat				%	80	90		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Meningkatnya hygiene sanitasi dasar dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat	Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai kualitas lingkungan sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	76	100	Program pengembangan lingkungan sehat	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	%	55	100			
				Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	56	80			
				Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	78	90			
				Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	54	90			
				Persentase desa yang melaksanakan STBM	%	5,3	40			
				Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	%	47	80	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		
				Cakupan posyandu purnama dan mandiri	%	30	60			
				Cakupan Desa/Kelurahan Siaga aktif	%	62	80			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Terbentuknya forum kesehatan tingkat kecamatan	kecamatan	0	12	Program peningkatan kemitraan Kesehatan	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Terbentuknya forum kesehatan tingkat desa / kelurahan	desa / kelurahan	0	135			
Meningkatkan kualitas manajemen, perencanaan dan pembiayaan kesehatan serta pengembangan kebijakan bidang kesehatan	Terselenggaranya manajemen kesehatan yang berkualitas	Penatakelolaan kesehatan sesuai standar serta penguatan advokasi dan peningkatan kerjasama lintas sektor	Mengembangkan jejaring SIK online dan menata sistem informasi kesehatan yang komprehensif berdasarkan <i>evidence based</i> yang cost efektif dan efisien	Persentase ketersediaan data SPM bidang kesehatan kabupaten	%	100	100	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Tersedianya dokumen profil kesehatan kabupaten	dokumen	1 Do	5			
				Persentase SIK online puskesmas	%	0	90			
				Tersusunnya draft perda SPM bidang kesehatan	dokumen	1	2	Program standarisasi, pengembangan kebijakan dan produk hukum bidang kesehatan		
				Tersusunnya draft perda perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta	dokumen	0	1			
				Tersusunnya draft perda / keputusan bupati tentang program pelayanan kesehatan gratis	dokumen	1	2			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di BLUD RSBG	Meningkatnya pelayanan promotif dan preventif bidang kesehatan	Melaksanakan promosi RS guna meningkatkan pemanfaatan RS oleh masyarakat	Peningkatan upaya promosi RS guna meningkatkan pemanfaatan RS oleh masyarakat	Minat pelanggan	%	0	1	Program promosi rumah sakit	Urusan Wajib Kesehatan	BLUD RSBG
				Indeks kepuasan pelanggan	%	0	90			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Angka pasien pulang paksa	%	0	1		Urusan Wajib Kesehatan	BLUD RSBG
				Angka pasien pindah RS	%	0	0,1			
				Cakupan kunjungan pasien rata-rata	%	0	> 1			
	Terwujudnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin	Meningkatkan cakupan masyarakat miskin yang difasilitasi jaminan pemeliharaan kesehatan	Pemberian layanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase warga miskin yang terlayani	%	80	100	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin		
	Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Terpenuhinya akreditasi dan standarisasi pelayanan RS	Tercapainya Akreditasi Paripurna versi 2012	%	80	80	Program standarisasi pelayanan kesehatan penyelenggaraan Akreditasi RS		
				Quality of place Bed occupancy rate(BOR)	%	73,7	85			
				Bed turn over (BTO)	kali	47	50			
				Turn over interval (TOI)	hari	2	3			
				Quality of service Gross death rate (GDR)	per 1.000	45,6	< 45			
				Nett death rate (NDR)	per 1.000	16,7	< 25			
				Angka Kematian Bayi	per 1.000	0	< 20			
				Angka Kematian Ibu	per 1.000	0	< 25			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Farmasi service level	%	0	< 75		Urusan Wajib Kesehatan	BLUD RSBG
				Death stock	%	0	< 3,5			
				Stock out	%	0	< 0,2			
				Radiologi Rata-rata kerusakan film	%	0	< 2			
				Laboratorium patologi klinik	%	0	< 0,5			
				Rata-rata jumlah pemeriksaan yang diulang karena keluhan	%	0	< 0,5			
				Rata-rata Turn around time (TAT)	%	0	≥ 85			
				Rata-rata jumlah sampling yang ditolak	%	0	< 0,5			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan RS	%	80	100	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		
				Prasarana gedung dan peralatan yang berkualitas baik	%	80	90	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit		
	Terwujudnya kesejahteraan medis/paramedis guna menunjang mutu pelayanan	Meningkatnya kesejahteraan medis/paramedis guna menunjang mutu pelayanan	Peningkatan kesejahteraan medis/paramedis guna menunjang mutu pelayanan	Terbayarnya jasa medis/paramedis guna menunjang mutu pelayanan	%	100	100	Program peningkatan pelayanan rumah sakit		



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan	Perluasan akses pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pendidikan D-III keperawatan	Cakupan 320 orang mahasiswa	%	62,5	85	Program pendidikan dan pengajaran tenaga kesehatan Akademi Keperawatan Pemda Kolaka	Urusan Wajib Kesehatan	Akper Pemda Kolaka
	Peningkatan kualitas pendidikan	Penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat tentang kesehatan	Melaksanakan tri darma perguruan tinggi	Terlaksananya tri darma perguruan tinggi	%	0	95			
		Melaksanakan penelitian dosen	Pengembangan kualitas lulusan akper	Terlaksananya pelatihan PPGD untuk mahasiswa	orang	0	90			
		Beasiswa mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	Pemerataan pendidikan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	Tersedianya tenaga perawat yang siap pakai di daerah terpencil	orang	75	25			
	Tata kelola kelembagaan	Peralihan status Akper Pemda Kolaka menjadi BLUD	Beralihnya status pengelolaan lembaga menjadi BLUD	Terlaksananya pengelolaan pelayanan pendidikan kesehatan yang berkualitas	%	75	100			
		Kegiatan akreditasi institusi	Melaksanakan persiapan akreditasi BAN PT	Tercapainya akreditasi BAN PT dengan nilai yang memenuhi syarat	%	0	100			
	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas gender dan anak	Meningkatkan peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan	Implementasi Permen PP-PA No. 4 Tahun 2011	Tersedianya data dasar dan peta partisipasi anak	kecamatan	2			
				Terbentuknya kelompok yang mewadahi aspirasi perempuan dan anak	kelompok	0	135			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Pengembangan dan penguatan dan jejaring perlindungan perempuan dan anak	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	Fasilitasi pelatihan bagi perempuan pelaku ekonomi	kegiatan	0	12	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (PKHP)	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan KB dan PP
				Sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG)	kegiatan	2	12	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		
Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui pelayanan keluarga berencana untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi	Meningkatkan pelayanan KB bagi pasangan usia subur dan meningkatkan jejaring kemitraan pelayanan KB	Peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas	Meingkatkan perencanaan kehamilan dan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak	Cakupan peserta KB : - Aktif - Baru	akseptor akseptor	25.659 7.035	37.305 8.859	Program keluarga berencana	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan KB dan PP
			Menjamin ketersediaan alat kontrasepsi	Tersedianya alat kontrasepsi	paket	1	5			
	Peningkatan institusi dan masyarakat peduli keluarga berencana	Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB	Menigkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola UPPKS	Cakupan peserta KB aktif anggota kelompok UPPKS	kelompok	11	40	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		
			Meningkatnya kemampuan PPKBD / Sub PPKBD dalam melaksanakan enam fungsi	Jumlah tenaga PPKBD dan Sub PPKBD	orang	560	560			
	Peningkatan konseling bagi PIK-KRR	Pembentukan kelompok PIK bagi remaja	Kelompok PIK-KRR yang dibentuk	kelompok	32	92	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			
Meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja			Cakupan kelompok PIK-KRR	kelompok	32	92	Program kesehatan reproduksi remaja			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Penggerakan sumberdaya masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan program KB	Pemberdayaan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	kelompok	80	131	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan KB dan PP
				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	kelompok	30	80			
				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	kelompok	40	75			
			Pembinaan kader Tribina (BKB, BKL dan BKR)	orang	120	200				
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	Fungsionalnya lembaga adat dan sosial masyarakat	Meningkatkan peran lembaga adat untuk memperkokoh ikatan sosial kemasyarakatan	Menyelenggarakan festival adat yang telah menjadi tradisi masyarakat sebagai agenda tahunan	Optimalisasi kinerja juru bicara adat	%	100	100	Program pengembangan nilai budaya	Urusan Wajib Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase ketersediaan tempat pagelaran seni dan budaya	%	100	100	Program pengelolaan kekayaan budaya		
				Tersusunnya kajian seni tari dan seni rupa	dokumen	0	1			
				Terlaksananya promosi budaya	kegiatan	7	10			
				Penelusuran / transliterasi sejarah dan budaya Mekongga	kegiatan	0	2			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Terselenggaranya gelar kesenian dan kebudayaan daerah di alun alun 19 Nopember	kegiatan	20	20	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Urusan Wajib Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Terlaksananya penyelenggaraan kajian, misi dan pentas seni	kegiatan	7	7				
Meningkatkan potensi industri kepariwisataan	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata	Meningkatkan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata, dengan meningkatkan pelayanan bagi wisatawan	Inventarisasi potensi wisata	Terciptanya promosi wisata yang baik	kegiatan	1	1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Urusan Wajib Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan pembinaan penyedia layanan bagi wisatawan di lokasi objek wisata, tempat penginapan, dan sentra perbelanjaan	Terpenuhinya hotel yang berkualitas	%	0	50	Program pengembangan destinasi pariwisata		
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	%	20	80			
	Meningkatnya produktifitas ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memberikan pembinaan / pelatihan	Meningkatkan pembinaan kepada pengrajin usaha ekonomi kreatif	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan berbagai macam kerajinan	kegiatan	0	2	Program ekonomi kreatif		
Meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial	Meningkatkan kegiatan bimbingan dan pelatihan sesuai kebutuhan bagi fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin dan, KAT dan PMKS lainnya	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	KK	200	600	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Urusan Wajib Sosial	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
		Meningkatkan kemampuan bagi rumah tangga sangat miskin	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui PKH	Terlaksananya pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	orang	2.914	2.000	Program Keluarga Harapan (PKH)	Urusan Wajib Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Meningkatkan metode dan kegiatan pelayan dan rehabilitasi sosial	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	100	100	Program pelayanan dan rehabilitasi sosial		
	Meningkatnya Pembinaan sosial terhadap penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan mutu dan metode kegiatan pembinaan anak terlantar	Mengembangkan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial	Jumlah anak terlantar yang dibina	orang	30	20	Program pembinaan anak terlantar		
		Meningkatkan kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi fakir miskin, KAT dan PMKS	Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan motivasi	Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	orang	25	25	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial		
		Meningkatnya mutu dan metode kegiatan pembinaan penyandang cacat dan eks trauma	Mengembangkan pembinaan masalah kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang cacat yang dibina	orang	45	45	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
		Meningkatnya mutu dan metode kegiatan pembinaan penyandang penyakit sosial	Peningkatan kapasitas pengelola sarana dan prasarana pembinaan penyandang penyakit sosial	Jumlah panti asuhan yang dibina	buah	2	2	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatkan kemampuan dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya kemampuan dan peran lembaga- lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat umum terutama yang mempunyai perhatian pada masalah keejahτεραan dan kelembagaan perlindungan sosial	Peningkatan kemampuan guna mendorong peran aktif lembaga- lembaga kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan sosial	orang	132	200	Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Urusan Wajib Sosial	Dinas Sosial
Terwujudnya fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan keagamaan	Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama	Menggiatkan aktivitas masyarakat dalam kegiatan keagamaan	Memberikan dukungan, fasilitasi, dan melakukan koordinasi terhadap kegiatan keagamaan	Terlaksananya MTQ tingkat kabupaten / provinsi / nasional	kali	3	15	Program Bagian Kesejahteraan Rakyat	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Kabupaten
			Persentase imam, khatib, pendeta / pastor, pinandita / pemangku, TPQ, dan pasraman yang mendapat insentif	%	100	100				
			Persentase terlaksananya kegiatan LPTQ, PHBK	%	100	100				
			Penetapan perda tentang penyelenggaraan ibadah haji	Terlaksananya kegiatan PPIH	kegiatan	1	5			
	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan	Memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Dukungan anggaran APBD	Jumlah rumah ibadah yang mendapat bantuan	unit	100	500			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Peningkatan mutu perpustakaan daerah	Penguatan tata kelola perpustakaan dan relevansinya terhadap peningkatan minat baca	Pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan	Menyediakan sarana prasarana perputakaan dan koleksi buku yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan	paket	0	13	Program pembangunan sarana prasarana perpustakaan	Urusan Wajib Perpustakaan	Bapersikom
				Tersedianya koleksi buku	judul buku	25.485	27.566	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		
				Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	15	77			
				Terlaksananya pengolahan dan pembedahan buku	semester	0	10			
			Meningkatkan peran serta pelajar dalam lomba bercerita tingkat nasional	Terlaksananya lomba bercerita	kali	1	16			

**7.4. MISI 4 : MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, EFISIEN, BERSIH DAN BERMARTABAT**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Penguatan kapasitas pemerintahan kecamatan / kelurahan	Mewujudkan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan / kelurahan	Pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana pemerintahan	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana kecamatan / kelurahan	Jumlah sarana / prasarana	unit	13	35	Program Bagian Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Kabupaten
	Terwujudnya tata batas wilayah yang jelas antar kecamatan, kelurahan dan desa	Penataan batas wilayah berbasis spasial	Fasilitasi penataan batas wilayah berbasis spasial	Persentase kecamatan / desa / kelurahan yang telah memiliki batas yang jelas	%	10	100			
Terwujudnya sistem pelayanan secara elektronik dan layanan pembangunan secara terpadu	Tercapainya pelaksanaan pelayanan secara elektronik 100 %	Optimalisasi pelaksanaan tender secara elektronik	Peningkatan peran ULP dan LPSE	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	84	100	Program Bagian Pembangunan	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Kabupaten
	Tercapainya pengendalian pembangunan secara terpadu dan terfokus	Meningkatkan sistem pengendalian pembangunan	Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan monev pembangunan	Terlaksananya monev pembangunan	kecamatan	12	12			
Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta monitor perkembangan dibidang sarana perekonomian dan peningkatan hasil produksi daerah	Meningkatnya koordinasi penyusunan juknis, pedoman teknis pengendalian, pengawasan dan promosi hasil produksi daerah	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemantauan potensi ekonomi daerah	Koordinasi pengawasan, pengendalian dan pemantauan potensi ekonomi daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi potensi perekonomian daerah	kecamatan	12	12	Program Bagian Perekonomian	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Kabupaten
			Melaksanakan promosi potensi perekonomian daerah	Terlaksananya promosi potensi perekonomian daerah	kegiatan	3	15			
	Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian pedesaan	Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian di desa	Pembangunan pasar desa	Jumlah pasar desa yang dibangun	unit	0	10			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sumberdaya alam	Terciptanya data dan informasi potensi SDA	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi SDA	Melaksanakan inventarisasi potensi SDA	Tersediaanya informasi mengenai pemanfaatan SDA	dokumen	200	1.000	Program Bagian Sumber Daya Alam	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Kabupaten
			Melaksanakan sosialisasi data dan potensi SDA	Tersosialisasinya data dan informasi potensi SDA	kegiatan	1	5			
Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan sarana dan prasarana umum pemerintahan	Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana umum pemerintahan	Fasilitasi pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana umum pemerintahan	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor dan rujab	tahun	1	5	Program Bagian Umum	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Kabupaten
				Terlaksananya pengadaan / rehabilitasi sarana dan prasarana kantor dan rujab	paket	4	14			
				Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat	unit	2	18			
				Terkelolanya poliklinik pemda	tahun	1	5			
Fasilitasi urusan pemerintah daerah dengan kementerian / lembaga dan pemerintah pusat serta promosi potensi Kab. Kolaka di Jakarta	Meningkatnya koordinasi urusan pemerintah daerah dengan K/L dan promosi daerah	Meningkatkan hubungan antara K/L dengan pemerintah daerah dan terpromosikannya potensi daerah	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi SKPD dengan K/L dan promosi yang difasilitasi Kantor Penghubung	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi SKPD dan promosi potensi daerah	%	100	100	Program peningkatan administrasi, sarana dan prasarana Kantor Penghubung	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Kantor Penghubung Pemda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di kecamatan, kelurahan dan desa	Terwujudnya peran pemerintahan lini depan kecamatan, kelurahan dan desa	Meningkatkan peran pemerintahan lini depan kecamatan, kelurahan dan desa	Desentralisasi fiskal ke kecamatan, kelurahan dan desa	Terlaksananya urusan pemerintahan kecamatan	%	100	100	Program penguatan peran pemerintahan lini depan	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Kecamatan, Kelurahan dan Desa
				Terlaksananya urusan pemerintahan kelurahan	%	100	100			
				Terlaksananya urusan pemerintahan desa	%	100	100			
Menciptakan aparatur sipil negara yang profesional	Melaksanakan rekrutmen pegawai ASN dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)	Menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan rekrutmen melalui sistem CAT	Pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN dengan menggunakan sistem CAT	Tersedianya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen yang profesional	orang	510	3.500	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
			Penyediaan perangkat komputer dalam mendukung pelaksanaan rekrutmen melalui IT	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN	unit	0	100	Program pengelolaan manajemen ASN berbasis IT		
	Mewujudkan pengembangan pegawai ASN	Melaksanakan diklat kepemimpinan II, III dan IV serta prajabatan bagi CPNS	Mengikuti pejabat yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan diklat ASN	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN	orang	0	3.062	Program pendidikan kedinasan		
		Melaksanakan seminar, kursus, pemagangan dan pertukaran PNS-swasta untuk meningkatkan profesionalisme PNS	Pelakukan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai ASN	Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai ASN	orang	0	1.000			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Mewujudkan manajemen kinerja pegawai berdasarkan prestasi dan sistem karir	Melaksanakan penilaian kinerja PNS dalam menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir	Melakukan penilain berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS	Terciptanya penilai pegawai yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan	%	0	100	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
	Mewujudkan sistem informasi kepegawaian sebagai media pelayanan, pengawasan dan pengendalian administrasi kepegawaian	Melakukan pengawasan terhadap perilaku disiplin pegawai dan ketaatan terhadap kode etik	Melaksanakan pemberlakuan penggunaan absensi sidik jari kepada semua SKPD	Terwujudnya pengawasan terhadap kehadiran PNS di setiap SKPD	%	65	90			
		Mengembangkan sistim informasi kepegawaian ASN yang berbasis kompetensi dan berbasis teknologi informasi	Melakukan penegakan peraturan disiplin pegawai ASN untuk menjamin tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas	Mengelola sistem informasi pegawai ASN berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya	Terwujudnya pegawai ASN yang disiplin dan profesional	%	0	90	Program pengelolaan manajemen ASN berbasis IT	
				Terwujudnya peningkatan pelayanan dan akurasi data kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	%	75	100			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Mewujudkan KORPRI yang kuat, netral dan profesional	Penguatan peran kelembagaan Sekretariat KORPRI	Fasilitasi dalam rangka penguatan kelembagaan Sekretariat KORPRI	Terselenggaranya LBH, kelompok olahraga, seni, dan sosial keagamaan anggota KORPRI	kegiatan	0	5	Program Sekretariat KORPRI	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat KORPRI
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah	Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dan aset daerah, serta efisiensi belanja	Tercapainya opini BPK dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	opini BPK	WDP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPKAD
			Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan	Tercapainya penyerapan anggaran belanja pmda	%	94,25	99,50	Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekretariat daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan sekretariat daerah yang akuntabel	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan sesuai SOP	Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akrual	Tercapainya pengelolaan keuangan setda yang maksimal	%	90	95	Program Bagian Keuangan	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		Mengembangkan SDM pengelolaan keuangan sekretariat daerah	Melaksanakan bimtek dan pelatihan	Tercapainya SDM yang handal	%	85	95			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Terwujudnya pengelolaan potensi pendapatan daerah yang optimal	Tercapainya pengelolaan pendapatan pajak, PBB-P2 dan retribusi	Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Penyusunan/revisi regulasi tentang pendapatan daerah	Persentase capaian target pendapatan	%	87	98	Program peningkatan pengelolaan pendapatan	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dinas Pendapatan
			Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan retribusi ke kecamatan dan desa / kelurahan							
			Pemberian insentif pemungut pajak dan retribusi	Besaran insentif pemungut pajak dan retribusi	% dari target	5	5			
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana pendapatan daerah	Pembangunan sarana dan prasarana pasar dan pendukungnya	Penyediaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun	paket	13	90			
	Meningkatnya SDM pengelola pendapatan daerah	Melaksanakan bimtek, sosialisasi dan diklat pengelolaan pendapatan daerah	Penyediaan anggaran untuk peningkatan SDM pengelola pendapatan daerah	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek, diklat dan sosialisasi	orang	14	104			
	Meningkatkan pendataan, pelaporan dan monev pendapatan daerah	Validasi data dan pendataan obyek baru	Meningkatkan peran pemerintahan lini depan camat, desa dan lurah	Meningkatnya nilai obyek pajak dan retribusi	%	46	95			
				Terlaksananya monev pendapatan daerah	kecamatan / SKPD	31	31			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Meningkatkan peran dan kontribusi Perusda terhadap pendapatan daerah	Mengoptimalkan kinerja Perusda dalam mengembangkan aneka usaha	Fasilitasi usaha dan manajemen Perusda Reformasi manajemen Perusda	Jenis usaha yang dikembangkan Meningkatnya status akreditasi Perusda	unit Disubsidi / kontributor	3 Disubsidi	5 Kontributor	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPKAD dan Perusda
Terwujudnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan masyarakat di segala aspek pembangunan	Terbinanya lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa Terpilinya kapala desa yang definitif Pengembangan bahan bakar alternatif (desa mandiri energi berbasis biogas) dan jarak pagar Penguatan dan peningkatan desa siaga aktif	kecamatan desa paket kecamatan	12 35 10 0	12 100 50 12	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	BPM dan Pemdes
	Tersedianya lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan peran lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan lembaga ekonomi desa	Tersedianya data dan informasi pemberdayaan dan pemerintahan desa Pemberian stimulan bagi usaha mikro kecil dan menengah Terbentuknya bumdes Terbangunnya los pasar desa	paket kelompok desa unit	1 1 0 0	1 5 90 20	Program penyebarluasan data dan informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	kecamatan	12	12	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Urusan Wajib Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	BPM dan Pemdes
				Terlaksananya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MPd	kecamatan	9	10			
	Meningkatnya keberdayaan kelembagaan dan aparat pemerintah desa	Meningkatkan keberdayaan kelembagaan desa	Peningkatan pemberdayaan lembaga desa	Tersedianya peta desa dan tugu tapal batas desa / kelurahan	unit	35	60	Program peningkatan keberdayaan kelembagaan desa	Urusan Wajib Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	BPM dan Pemdes
				Pelatihan ketua LPM	orang	40	200			
				Terbangunnya kantor UPK	unit	11	12			
		Meningkatkan kapasitas aparat dan penyelenggara pemerintah desa	Fasilitasi bimtek dan diklat aparat dan penyelenggara pemerintah desa	Jumlah bendahara desa yang mengikuti pelatihan	orang	0	510	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa		
				Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan	orang	0	102			
				Jumlah sekdes / seklur yang mengikuti pelatihan	orang	28	150			
				Jumlah kepala desa / lurah yang mengikuti pelatihan	orang	40	200			
				Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan	orang	40	100			
	Terwujudnya ketertiban dan kedamaian	Mewujudkan ketertiban dan kedamaian	Meminimalisir permasalahan di desa / kelurahan	Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa	desa	35	100	Program penyelesaian permasalahan pemerintahan desa / kelurahan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatkan rasa aman dan ketentraman masyarakat	Terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, tentram dan terlindungi	Mengembangkan pembinaan dinamika masyarakat kearah kehidupan yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara	Meningkatkan pembinaan satuan linmas di daerah	Persentase pembangunan pos jaga	%	99,3	100	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan Wajib Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol dan Linmas
				Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	kecamatan	12	12			
				Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat	kegiatan	1	5			
		Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk penyelesaian konflik di daerah	Memelihara keragaman komunitas sosial dalam rangka pengembangan masyarakat madani	Terlaksananya koordinasi Kominda dalam cegah tangkal dini kriminal	kegiatan	1	5	Program peningkatan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal		
				Terlaksananya penanganan gangguan keamanan dalam negeri	kegiatan	1	5			
				Terlaksananya penyuluhan pencegahan praktek perjudian	kecamatan	12	12	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat		
		Peningkatan kesadaran kebangsaan dan persatuan nasional	Pengembangan orientasi pemantapan ketahanan bangsa	Terlaksananya forum kerukunan umat beragama	kegiatan	1	5	Program pengembangan wawasan kebangsaan		
				Terlaksananya forum pembauran bangsa	kegiatan	1	5			
				Terlaksananya koordinasi pemantauan orang asing, NGO dan lembaga asing lainnya	kegiatan	1	5	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
						2013	2018					
				Terlaksananya seminar / talk show / diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	kecamatan	12	12		Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol dan Linmas		
			Pembentukan pokja pendidikan wawasan kebangsaan	kecamatan	12	12						
	Terwujudnya kemandirian partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat	Pemberdayaan infrastruktur politik dan ormas	Menjalin komunikasi dan kerjasama parpol dan ormas	Terlaksananya koordinasi forum-forum politik	kecamatan	12	12	Program pendidikan politik masyarakat				
Terlaksananya penyuluhan pendidikan politik pemula				kecamatan	12	12						
Terlaksananya forum komunikasi lintas LSM, ormas dan OKP				kegiatan	1	5	Program peningkatan pembinaan ormas					
Tersedianya database ormas				paket	1	1						
Menciptakan keamanan Ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kanrantibmas dalam mencegah tindak kriminal	Mengoptimalkan operasi ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	100	700	Program peningkatan keamanan kenyamanan lingkungan			Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Satpol PP
		Meningkatkan pemahaman tentang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah di masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan	Persentase penegakan perda	%	0	100	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Terwujudnya penataan organisasi dan tatalaksana aparatur pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Tersusunnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, proposional, dan transparan, serta hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya	Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah	Penetapan perda tentang organisasi perangkat daerah (kelembagaan)	Tersusunnya perda kelembagaan organisasi perangkat daerah	perda	4	8	Program Bagian Organisasi	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
	Penataan ketatalaksanaan meliputi sistem, prosedur, tatakerja dan hubungan kerja yang jelas	Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana	Penataan sistem kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pembagian kerja	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)	dokumen	45	55			
				Tercapainya penerapan standar pelayanan minimal	bidang	15	15			
				Terlaksananya penyusunan analisis jabatan	dokumen	45	55			
Peningkatan sistem dan pelayanan persandian dan telekomunikasi	Terlaksananya kegiatan persandian dan telekomunikasi	Mewujudkan sistem jaringan persandian dan telekomunikasi	Peningkatan SDM persandian	Jumlah tenaga sandiman	orang	1	5	Program Bagian Humas	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
			Penyediaan peralatan sandi dan telekomunikasi	Kasa (kamar sandi)	paket		1			
		Pengamanan dokumen dan perlengkapan rahasia negara	Kunci sistem persandian	Sistem persandian (buku OTP, crypto)	set	1	5			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan (humas)	Terlaksananya kegiatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Mewujudkan kemitraan masyarakat melalui, pertemuan, seminar, dialog, dan publikasi kebijakan program dan kegiatan pemda	Penyediaan pelayanan komunikasi masyarakat melalui media massa, media internal, sms pemda, dan melakukan dialog, seminar serta forum diskusi	Tersedianya bahan publikasi media massa	paket	1	5	Program Bagian Humas	Urusan Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
				Terlaksananya diskusi, seminar dan dialog publik	kegiatan	0	10			
			Penyediaan dan pengembangan petugas pranata humas serta peningkatan SDM	Ketersediaan sarana dan prasarana publikasi, komunikasi dan dokumentasi	paket	1	5			
				Jumlah tenaga pranata humas	orang	0	10			
				Jumlah KIM	kelompok	0	13			
				Pembentukan, pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat						
		Mewujudkan pengembangan kemitraan media dan organisasi pers	Pelayanan, pembinaan dan pengembangan media massa dan organisasi pers	Terlaksananya pengembangan dan pelatihan media massa dan organisasi pers	kegiatan	1	5			
	Terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	Mewujudkan analisa media dan informasi serta analisa pemberitaan media massa	Penyediaan klipng informasi dan pemberitaan media sebagai sumber evaluasi dan kebijakan	Bahan cetak harian/analisis berita dan media	eksamplar	0	5			
			Pengembangan SDM analisis berita, tenaga dokumentasi	Jumlah SDM yang dilatih	orang	5	10			
		Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi	Pembentukan DESK PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)	Optimalisasi desk PPID	kegiatan	0	1			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Mewujudkan sistem hukum dan HAM yang memberikan kepastian hukum	Terwujudnya produk hukum daerah yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah	Semua produk hukum daerah harus melalui verifikasi dan registrasi Bagian Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	dokumen	108	133	Program Bagian Hukum	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		Pembangunan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)	Pengadaan sarana dan prasarana sistem JDIH	Jumlah sarana dan prasarana JDIH yang dibangun	paket	0	1			
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah	Peningkatan kegiatan sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah di kecamatan	kecamatan	5	12			
	Meningkatnya penegakan HAM	Sosialisasi dan diseminasi HAM	Fasilitasi rencana aksi nasional HAM Kab. Kolaka	Terlaksananya kegiatan pokja RANHAM kabupaten	kegiatan	1	1			
				Tersusunnya laporan evaluasi RANHAM	dokumen	2	10			
	Pemberian advokasi kepada pemda Kab. Kolaka dalam rangka penyelesaian kasus-kasus perdata, TUN dan penegakan kebijakan daerah	Meningkatkan SDM tim advokasi pemda Kab. Kolaka	Fasilitasi bimtek dan diklat SDM tim advokasi	Terselesaikannya kasus-kasus hukum pemda	kasus	2	10			
Mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah / lokasi milik pemerintah daerah	Terwujudnya kepastian hukum kepemilikan tanah / lokasi milik pemerintah daerah	Pensertifikasian tanah milik pemerintah daerah	Fasilitasi pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Persentase tanah pemda yang tersertifikasi	%	45	90	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Urusan Wajib Pertanahan	Sekretariat Daerah
		Penyelesaian konflik tanah / lokasi yang dikuasai oleh pemerintah daerah	Fasilitasi ganti rugi / kompensasi tanah masyarakat yang dikuasai pemerintah daerah	Persentase lokasi / tanah konflik yang terselesaikan	%	20	80	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat guna, dan komprehensif	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat guna, dan komprehensif	Memantapkan pelaksanaan proses perencanaan politik, teknokratik, partisipatif, <i>bottom up-top down</i>  Meningkatkan efektifitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regional, sektoral, dan kewilayahan	Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah dan dunia usaha	Jumlah kerja sama yang dibangun	MoU/Nota Kesepahaman	7	12	Program kerjasama pembangunan	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Fasilitasi Penegasan batas wilayah	Persentase Jumlah Kec/Desa/Kel yang sudah ada penegasan batas wil	%	75	100	Program pengembangan wilayah perbatasan		
			Penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh	dokumen	0	3	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh		
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan umum pembangunan daerah	dokumen	8	30	Program perencanaan pembangunan daerah		
			Mengefektifkan monev perencanaan pembangunan	Terselenggaranya monev perencanaan pembangunan daerah	kali	2	10			
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan/kajian bidang ekonomi	dokumen	1	10	Program perencanaan pembangunan ekonomi		
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen perencanaan/kajian bidang sosial dan budaya	dokumen	1	10	Program perencanaan sosial budaya		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan/kajian prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	dokumen	3	10	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Dokumen Rencana Penataan Ruang		dokumen	2	2			
		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan aparat perencana	Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kemampuan Aparat Perencana	Persentase aparat perencana yang telah mengikuti pendidikan perencanaan	%	50	80	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		
Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan data serta hasil kajian penelitian pembangunan	Meningkatnya kualitas penyediaan dan pengelolaan data, informasi dan hasil kajian penelitian pembangunan	Meningkatkan kegiatan penelitian/kajian untuk bahan perencanaan pembangunan	Penyediaan Sistem Informasi Perencanaan	Tersedianya sistem informasi perencanaan	sistem	0	1	Program pengembangan data/informasi		
			Membangun Kemitraan / Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya	Jumlah hasil penelitian	dokumen	2	10			
Tersedianya data statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan	Tersedianya data statistik daerah yang lengkap, akurat	Penyiapan data/informasi secara terkoordinasi	Melakukan kerja sama dengan badan pusat statistik daerah	Tersedianya dokumen data / informasi statistik daerah	dokumen	16	80	Program pengembangan data/informasi statistik	Urusan Wajib Statistik	Bappeda
				Terlaksananya Forum Data Statistik Daerah	kegiatan	1	5			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Menciptakan organisasi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel memenuhi azas <i>good governance, clean dan strong governance</i>	Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi pelaksanaan SPIP dan meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan	Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Persentase capaian program kerja pengawasan tahunan	%	100	100	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
			Fasilitasi pelaksanaan diklat fungsional dan teknis	Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat	%	75	100	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		
			Penyusunan kebijakan pengawasan	Persentase regulasi pengawasan yang ditetapkan	%	60	100	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
			Penyusunan dan sosialisasi juknis SPIP	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	%	0	70	Program penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) lingkungan Pemerintah Kab. Kolaka		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi anggota DPRD	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi anggota DPRD	Fasilitasi bimtek dan pelatihan bagi anggota DPRD	Persentase anggota DPRD yang mengikuti bimtek dan pelatihan	%	100	100	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekreariat DPRD	
			Jumlah rapat paripurna dan rapat-rapat kelengkapan dewan	kali	162	810				
			Persentase anggota DPRD yang mengikuti kegiatan reses dan kunjungan kerja / kunjungan lapangan	%	100	100				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Terwujudnya peningkatan administrasi kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD	Meningkatkan pengelolaan administrasi kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD	Mengoptimalkan pengelolaan administrasi kesekretariatan	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD setwan	%	100	100	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekreariat DPRD
	Ditetapkannya perda, baik atas usul eksekutif, maupun inisiatif DPRD	Memfasilitasi efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam legislasi	Fasilitasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD	Jumlah raperda usul inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda	perda	16	80	Program badan legislasi		
Terwujudnya database penduduk yang akurat	Terlaksananya sistem pendaftaran penduduk secara komputerisasi	Meningkatkan SDM pengelola SIAK	Pelatihan dan bimbingan teknis SDM pengelola SIAK	Jumlah pengelola SIAK yang mengikuti pelatihan / bimtek	orang	1	13	Program penataan administrasi kependudukan	Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Meningkatkan sarana IT kependudukan	Pengembangan sarana SIAK sampai kecamatan	Jumlah sarana SIAK yang tersedia	unit	8	23			
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem jemput bola	Persentase kepemilikan KTP	%	60,65	85,65			
				Persentase kepemilikan akta-akta catatan sipil	%	76,95	91,95			
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Melaksanakan sosialisasi sistem dan mekanisme pendaftaran penduduk	Penyuluhan sistem administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan	Pelaksanaan penyuluhan sistem administrasi kependudukan	kali	12	49			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Terwujudnya sistem pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, tepat, mudah, akurat dan terpercaya	Terwujudnya pelayanan prima melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu	Mengintegrasikan pengelolaan perizinan dan non perizinan secara terpadu	Menetapkan regulasi tentang pengelolaan seluruh perizinan dan non perizinan di KPPT dan PM	Jumlah perda perizinan yang ditetapkan	perda	3	8	Program peningkatan pelayanan perizinan	Urusan Wajib Penanaman Modal	KPPT dan PM
				Jumlah perbup perizinan yang ditetapkan	perbup	3	16			
				Jumlah perizinan yang dikelola	izin	11	47			
				Persentase pelayanan yang memiliki SPM dan SOP	%	65	100			
	Meningkatkan penanaman modal dan nilai investasi	Meningkatkan ketersediaan data SDA yang memadai dan kegiatan promosi	Mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, temu bisnis dan pemanfaatan media elektronik	Jumlah investor PMA dan PMDN	perusahaan	5	7	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		
				Nilai Investasi PMA dan PMDN	juta \$	150	400	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		
					milyar Rp.	200	700			
Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	250	1.250							
Mengembangkan sistem pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah yang terukur dari peningkatan sistem informasi, ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM yang handal	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah	Menciptakan tata kelola kearsipan daerah yang handal	Pemberlakuan aturan baku sistem pengarsipan	Ketersediaan sistem regulasi tentang pengelola arsip	dokumen	0	14	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Urusan Wajib Kearsipan	Bapersikom
				Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan dokumen arsip	paket	0	60			
				Terlaksananya pengolahan arsip	SKPD	4	16			
				Pelaksanaan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	semester	0	10	Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
			Fasilitasi penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Ketersediaan rangkaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip	kegiatan	1	20	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip	Urusan Wajib Kearsipan	Bapersikom
			Meningkatkan pengelolaan kearsipan berbasis digital	Terlaksananya penyediaan informasi kearsipan berbasis digital	kegiatan	0	13	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan		
			Fasilitasi pelaksanaan diklat teknis pengelolaan kearsipan	Jumlah peserta diklat teknis pengelolaan kearsipan	orang	0	8	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang kearsipan		
Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dalam penanganan atau tindakan pemadaman kebakaran	Meningkatkan cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0,47	0,95	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Urusan Wajib	BLHK
		Peningkatan kapasitas satgas pemadam kebakaran	Melaksanakan pelatihan dan simulasi penanganan bencana kebakaran	Persentase ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan)	%	100	100			
				Terciptanya satgas pemadam kebakaran yang terlatih	orang	20	50			
Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan pemakaman	Meningkatnya ketersediaan lahan pemakaman umum	Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman	Penyediaan lahan pemakaman baru	Rasio tempat pemakaman umum	per 1.000 penduduk	270,44	318,56	Program pengelolaan areal pemakaman		

**7.5. MISI 5 : MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Cakupan pelayanan angkutan sampah	kecamatan	3	4	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	BLHK
				Persentase penanganan sampah	%	76,97	84,98			
				Rasio tempat pembuangan sampah	per 1.000 penduduk	12,80	19,05			
	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemar	Intensifikasi pengawasan usaha atau kegiatan berpotensi menimbulkan pencemaran	Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL	%	100	100	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
				Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan yang ditangani	%	100	100			
				Persentase usaha atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air dan udara	%	100	100			
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam sesuai ketentuan yang berlaku	Peningkatan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan sumberdaya alam	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui penerapan regulasi pengelolaan sumberdaya alam	Sumber-sumber air yang di konservasi dan di lindungi dari kerusakan	lokasi	0	3	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
				Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA	kecamatan	0	12		Urusan Wajib Lingkungan Hidup	BLHK
				Luas terumbu karang dan mangrove yang direhabilitasi	ha	0	7	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam		
				Sosialisasi pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan kepada masyarakat	kali	0	4			
		Peningkatan pemahaman tentang SDA dan lingkungan	Penyediaan informasi SDA dan lingkungan	Tersedianya dokumen Profil Taman Keanekaragaman Hayati	dokumen	1	5	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup		
Tercapainya pemenuhan kawasan ruang terbuka hijau	Meningkatkan komitmen penyediaan ruang terbuka hijau	Pemeliharaan RTH taman kota dan pengembangan RTH pedesaan	Jumlah RTH taman kota	lokasi	7	18	Program pengelolaan ruang terbuka hijau			
			Penyediaan bibit tanaman untuk RTH pedesaan	pohon	12.000	60.000				
			Pemeliharaan sungai dalam kota Kolaka	km	8	60				
		Penerapan rencana aksi daerah gas rumah kaca	Terlaksananya rencana aksi daerah gas rumah kaca	kegiatan	0	4				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
Menjadikan kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan dan fungsi sosial ekonomi	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatkan potensi hutan produksi yang potensial menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya	Mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu maupun non kayu	Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan	paket	0	3	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Urusan Pilihan Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Merehabilitasi hutan dan lahan kritis	Memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dalam pembangunan kehutanan	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	ha	5.000	67.000	Program rehabilitasi hutan dan lahan		
		Melaksanakan kegiatan HKM, agroforesti, hutan rakyat yang berbasis masyarakat								
	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Menyelenggarakan peraturan perundang – undangan secara konsisten menjamin perlindungan dan pengawasan secara baik serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat	Meminimalisasi penyerobotan dan kebakaran hutan, pencurian hasil hutan, klaim kawasan serta pengamanan hutan swakarsa	Persentase hutan yang berubah peruntukan dan kehilangan akibat pencurian hasil hutan	%	31	10	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		
	Meningkatkan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Meningkatnya industri sektor hutan untuk meningkatkan investasi kehutanan	Melakukan pembinaan dan penertiban terhadap industri hasil hutan	Jumlah izin/perusahaan yang mendapat pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	IPHHK	18	43	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan		
Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan industri	Memanfaatkan kawasan hutan untuk ditanami tanaman non kehutanan	Memanfaatkan kawasan hutan untuk penanaman tanaman industri dan ekonomi produktif	Tersedianya pemanfaatan kawasan hutan industri	izin	18	27	Program pemanfaatan kawasan hutan industri			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Memantapkan batas kawasan hutan Kab. Kolaka	Melakukan penataan batas kawasan hutan	Menyelenggarakan penataan batas kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang tertata	km	0	300	Program pemantapan batas kawasan hutan	Urusan Pilihan Kehutanan	Dinas Kehutanan
	Meningkatkan perencanaan dan pengembangan hutan	Melakukan perencanaan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat	Menyelenggarakan pengelolaan hutan berdasarkan perencanaan dan fungsi hutan	Tersusunnya rencana pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya	dokumen	0	5	Program perencanaan dan pengembangan hutan		
Meningkatkan fungsi dan kapasitas pengelolaan sumberdaya mineral	Meningkatnya industri pengolahan sumberdaya mineral	Mengembangkan sistem investasi yang lebih transparan dan efisien	Penerapan prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku	Meningkatnya status iup eksplorasi menjadi iup operasi produksi (izn)	Jumlah IUP	36	55	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
	Terciptanya kegiatan pengelolaan pertambangan yang baik dan benar	Meningkatkan kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Melakukan pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan	Terlaksananya pengawasan K3 dan lingkungan	kegiatan	4	8	Program pembinaan teknis dan lingkungan kegiatan usaha pertambangan		
			Melakukan pengawasan produksi pertambangan	Terlaksananya pengawasan bidang pertambangan umum	kegiatan	2	4	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan		
			Melakukan pengawasan konservasi bahan galian	Terlaksananya pengawasan konservasi dan inventarisasi sumberdaya mineral	kegiatan	8	16			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						2013	2018			
	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Mengoptimalkan kapasitas pengolahan sumberdaya mineral	Meningkatkan pemanfaatan pengolahan sumberdaya mineral	Kontribusi penerimaan daerah dari sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah	%	3,23	5,84	Program peningkatan penerimaan daerah dari sektor pertambangan		
Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana alam melalui prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Penguatan kelembagaan	Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan	Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor	%	50	100	Peningkatan sarana dan program aparatur	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa	BPBD
	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko bencana	Sosialisasi / pelatihan dan simulasi.	Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan resiko bencana alam	kegiatan	12	12	Program Pencegahan dini Bencana		
	Mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan dan Pasca bencana	Penurunan tingkat kerentanan terhadap kerugian korban jiwa, harta benda korban.	Pelaksanaan Undang-undang No. 24 / 2007, PP No. 21 / 2008 dan Perda No. 1/2014	Terpenuhinya kebutuhan korban bencana alam	%	50	100	Program Penanggulangan korban bencana		